

**PENGARUH KOORDINASI TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL
PRODUK USAHA KERAJINAN TANGAN DAN BORDIR
DI KOTA TASIKMALAYA**

Oleh

Astri Siti Fatimah

astrifatimah@gmail.com

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Tasikmalaya
Jln. Perintis Kemerdekaan No. 200 Tasikmalaya

Abstrak : Industri kecil memiliki peranan strategis dalam perdagangan nasional hal ini karena proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, lokal maupun pasar internasional, tetapi daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar pengaruh koordinasi dengan pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir sebesar 29,7 % sedangkan 70,3 % disebabkan oleh faktor lain.

Kata kunci : Industri kecil, koordinasi, pengembangan

Pengembangan usaha industri kecil sangat penting dilakukan mengingat perannya dalam perdagangan nasional yang sangat strategis. Pembeneran paling mendasar untuk mengembangkan usaha kecil adalah bahwa proporsi usaha skala kecil mempunyai daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Sejalan dengan sistim perekonomian rakyat, keberadaan industri kecil merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang harus dipertahankan dan terus

dikembangkan secara berkesinambungan. Kenyataan menunjukkan bahwa industri kecil cukup mampu bertahan dalam menghadapi gelombang krisis ekonomi yang melanda Indonesia dibandingkan dengan industri besar.

Isu yang tetap menarik untuk diungkap dalam dinamika ekonomi nasional hingga sekarang ini adalah isu tentang usaha kecil. Penomena yang nampak kepermukaan adalah bagaimana mengembangkan usaha

kecil tersebut agar tetap eksis dan mampu bersaing dengan keberadaan usaha yang berskala besar. Industri kecil sebenarnya sangat fleksibel, namun mereka sulit untuk berkembang. Sedangkan usaha mereka sebenarnya sangat potensial.

Pembangunan industri juga diarahkan untuk lebih meningkatkan industri kecil dan industri rumah tangga. Usaha tersebut dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dan pengembangan usaha peningkatan produktivitas, perbaikan mutu produksi serta meningkatkan keterampilan para pengrajin. Dengan berkembangnya industri kecil dan industri rumah tangga akan meningkatkan pula pendapatan pengusaha dan buruh industri sehingga mampu memberikan sumbangan pendapatan yang besar terhadap keluarga.

Sejalan dengan aktualisasi otonomi daerah, setiap daerah relatif diberikan kebebasan untuk menetapkan visi dan misi pembangunannya sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak terkecuali Kota Tasikmalaya sebagai salah satu pusat

pertumbuhan di wilayah Priangan Timur juga telah menetapkan visinya yaitu dengan Iman dan Taqwa Kota Tasikmalaya Menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Termaju di Priangan Timur Tahun 2012.

Kota Tasikmalaya memiliki banyak sumber daya yang dapat dikembangkan, baik industri bordir, makanan atau kerajinan. Industri Kecil Menengah telah terbukti mampu menghasilkan berbagai komoditas, local maupun pasar internasional. Sayangnya, daya saing dari produk yang dihasilkan pengusaha tersebut belum maksimal.

Untuk mengejar target pesanan tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan maksimal maka program kemitraan merupakan kata ideal. Kemitraan antara pemodal besar dengan pemodal kecil merupakan salah satu strategi yang dapat dikembangkan untuk kemajuan bersama. Kemitraan yang didasari kesadaran bahwa yang besar membutuhkan yang kecil, yang kecil membutuhkan yang besar.

Sebagai salah satu pusat kerajinan Bordir yang terletak di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

telah dapat dibuktikan bahwa adanya kesadaran untuk saling menguntungkan (memajukan) atau simbiosis mutualisme seperti itulah yang harus ditumbuhkembangkan. Para pengusaha kecil selalu mendapatkan order untuk usaha bordir dari pengusaha besar dengan hitungan perkodi.

Dalam proses pembuatan kerajinan bordir, faktor produksi yang digunakan adalah tenaga kerja, modal, dan peralatan, sedangkan bahan baku yang digunakan adalah kain. Pada industri rumah tangga kerajinan bordir di Kecamatan Kawalu, dalam proses pembuatannya dari bahan baku menjadi barang jadi masih banyak yang menggunakan alat tradisional atau mesin juki disamping ada juga yang menggunakan dengan teknik komputer.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi para pengusaha menengah mulai melirik komputer sebagai alat untuk menghasilkan bordir. Tentu saja bahwa harga alat tersebut sangat mahal. Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk satu paket yang terdiri dari komputer berikut 18 unit

mesinnya harganya mencapai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ini dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja menjadi 17 orang dan menimbulkan pengangguran sebanyak 217 orang.

Tentu saja para pengusaha kecil merasa usaha mereka terancam gulung tikar karena bakal kalah bersaing dengan para pemilik modal besar yang menawarkan harga lebih bersaing dengan produk lebih unggul dan cepat. Disamping itu juga keterbatasan informasi pasar yang dimiliki pelaku usaha tentang sumber bahan baku serta panjangnya jaringan distribusi mengakibatkan harga barang baku di tangan pengusaha kecil dan menengah menjadi mahal. Selain itu, system pengembangan usaha, komitmen pemda dan DPRD terhadap dukungan permodalan usaha kecil dan menengah masih terbatas. Sehingga keberpihakan lembaga keuangan dan perbankan belum seperti yang diharapkan.

Tidak hanya itu, proses perizinan usaha, paten, merek dan ijin ekspor terlalu berbelit belit dengan biaya tinggi sehingga banyak dikeluhkan pelaku usaha. Selain

keterbatasan informasi, kendala yang dihadapi pelaku usaha juga diperparah dengan kualitas SDM yang rendah baik meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu/standarisasi produk dan wawasan kewirausahaan.

Tidak dimilikinya jalur transportasi yang cepat guna menghubungkan *buyer* asing dengan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Tasikmalaya membuat transaksi antara pelaku UKM Tasikmalaya dengan asing tersendat. Buktinya sejauh ini, nilai atau volume ekspor pelaku UKM Tasikmalaya yang dilakukan langsung sangat minim. Umumnya pengrajin melakukan transaksi dengan buyer asing dengan menggunakan jasa broker atau agen lainnya di kota – kota besar. Hal itu terjadi karena buyer asing enggan berlama – lama mencari lokasi produk. Padahal jika dapat dilakukan dengan langsung, keuntungannya jelas lebih baik. Bayangkan saja untuk satu kerai, pengrajin hanya dihargai Rp. 8.000 oleh broker. Sementara broker menjualnya kembali ke pengusaha asing Rp. 45.000. Dengan kondisi itu,

otomatis pengrajin belum menikmati hasilnya dengan nilai yang setimpal.

Berbagai permasalahan yang sangat rumit dan demikian kompleks itu menjadi sesuatu yang menghambat perkembangan pengusaha kecil dan menengah terutama para pengrajin bordir dalam menjalankan roda aktivitasnya. Sebagai sumber pendapatan secara ekonomis harus juga diperhitungkan seberapa besar manfaat atau keuntungan dari usaha kerajinan bordir tersebut dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Apabila dianalisa lebih jauh, ternyata terdapat kesenjangan antara kondisi actual dengan kondisi ideal sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pengembangan usaha kecil menengah sebagai suatu asset yang harus terus dipertahankan. Akan tetapi kenyataannya tidak semudah membalikan telapak tangan terlalu banyak masalah yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Letak permasalahannya adalah diduga koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Indag & UKM belum dilakukan secara optimal dengan indikasi :

1. Terbatasnya jadwal pembinaan yang dilakukan Dinas Indag terhadap industri kecil.
2. Lemahnya mekanisme tukar menukar informasi.
3. Kurang respek terhadap kesulitan yang dihadapi industri kecil.
4. Kurangnya pengarahan tentang pentingnya menjalin kerjasama dengan pihak lain.

RUMUSAN MASALAH

Yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah apakah koordinasi berpengaruh terhadap pengembangan industri kecil produk usaha kerajinan tangan dan bordir di Kota Tasikmalaya ?

PEMBAHASAN

Dalam pengembangan industri kecil faktor biaya merupakan suatu pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha tertentu dan biasanya dinilai dengan uang. Selain dalam bentuk uang, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah faktor tenaga kerja, bahan baku, mesin, market, dan sebagainya. Adanya satu keterkaitan antara faktor-faktor yang satu dengan yang lain, seperti halnya tidak akan

ada hasil produksi kalau hanya bahan bakunya saja yang tersedia tanpa adanya manusia.

Bagi suatu perusahaan, pendapatan adalah semua penerimaan produsen dari hasil penjualan produknya. Pendapatan diperoleh dari besarnya barang yang dihasilkan dikalikan dengan harga barang tersebut (Richard A. Bilas, 2003).

Suatu perusahaan akan mencapai taraf efisiensi ekonomis apabila adanya perbandingan antara pendapatan total dengan biaya total (Sudarsono, 2002).

Agar pendapatan total dalam lingkup secara nasional meningkat, maka daya beli konsumen pun menjadi titik sentral yang perlu juga mendapat perhatian.

Industri kecil menurut Surat Edaran BI adalah : "Usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati baik meliputi usaha perseorangan, badan usaha dan koperasi. Berbeda dengan BI, pengertian industri kecil menurut BPS adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai 20 orang.

Terlepas dari keragaman batasan tersebut, tampaknya yang paling penting untuk diketahui adalah ciri-ciri umum keterbelakangan industri kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mitzerg dan musselman serta Hughes, dapat disimpulkan ciri-ciri umum keterbelakangan industri kecil dalam garis besarnya :

1. Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha
2. Struktur organisasi bersifat sederhana
3. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar
4. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan
5. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali
6. Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya
7. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas
8. Marjin keuntungan sangat tipis.

Industri kecil sebenarnya sangat fleksibel tetapi mereka sulit

untuk berkembang. Sedangkan usaha mereka pada umumnya sangat potensial. Dalam kenyataannya pada masa sekarang ini, pengusaha kecil banyak yang kurang berhasil , karena keterbatasan kemampuan sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Dalam kegagalannya mereka selalu mengatakan alasan seperti yang dikemukakan oleh B.N Marbun (2004 : 25) ”bahwa tidak berkembangnya usaha mereka adalah karena kurang modal, kurang bimbingan pemerintah, dominasi orang Cina, Konglomerat dan dominasi modal kuat dan lain-lain.”

Padahal kalau diteliti lebih dalam maka alasan utama kegagalan mereka biasanya bermuara atau berkaitan pada kelemahan perusahaan itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh B.N. Marbun (2004 : 40), berbagai kelemahan yang menyebabkan perusahaan gagal adalah :

1. Tidak atau jarang mempunyai perencanaan tertulis
2. Tidak berorientasi atau berpedoman ke masa depan, melainkan pada hari kemarin atau hari ini.

3. Tidak memiliki pendidikan yang tepat atau relevan
4. Tidak mengadakan penelitian pasar yang tepat waktu dan mutakhir
5. Tanpa pembukuan yang teratur
6. Kurang spesialisasi
7. Jarang mengadakan pembaharuan (inovasi)
8. Cepat merasa puas
9. Keluarga sentris
10. Kurang percaya atau kurang tanggap pada ilmu modern.

Berdasarkan beberapa ciri umum di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbelakangan industri kecil di atas terutama tampak pada kelemahan manajerialnya. Hal ini dapat terungkap baik pada kelemahan pengorganisasian, perencanaan, pemasaran maupun kelemahan dalam masalah akuntansi. Hal itu mudah dipahami, selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan modal, tingkat perkembangan industri kecil memang belum mampu untuk mempekerjakan manajer-manajer profesional.

Dalam perkembangannya industri kecil seringkali mendapat hambatan yang menyebabkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan. Christian Lempelius membuat skema yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab lemahnya industri kecil yang diberi nama lingkaran tak berujung pangkal dari keterbelakangan industri kecil.

Untuk menata agar para pengusaha kecil tersebut dapat tetap eksis, maka salah satu indikasinya adalah memerlukan koordinasi dari instansi terkait. Aparat Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat besar terhadap pembinaan usaha kecil dan menengah ini. Dengan demikian seorang Aparat atau administrator harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan yang ada hubungannya dengan upaya pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya Soewarno Handyaningrat (2000 : 89) yang mengutip pendapat Mc. Farland sebagai berikut : “Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama”.

Dari pengertian di atas, memberikan gambaran bahwa koordinasi merupakan suatu usaha untuk mengatur sebagai tindakan atau aktivitas agar terarah pada suatu tujuan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kegiatan, kerjasama dan tujuan, sebagai titik tolak dari usaha tersebut juga koordinasi bukan merupakan tujuan akhir, maka hanya merupakan suatu alat untuk mempercepat pencapaian tujuan. Unsur utama koordinasi adalah kerjasama, sehingga penulis berpendapat bahwa apabila tidak ada kerja sama maka tidak mungkin pekerjaan itu dapat diselesaikan.

Apabila dikaitkan dengan salah satu organisasi pemerintahan, koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting sebab pada dasarnya koordinasi itu merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen. Dengan koordinasi semua kegiatan dapat dilakukan secara serempak dan terarah kepada suatu tujuan yang dikehendaki. Tanpa adanya koordinasi maka berbagai unsur dalam suatu organisasi di dalam melakukan kegiatannya akan berjalan sendiri-

sendiri tanpa memperhatikan tugas-tugas pihak lain.

Sehubungan dengan itu maka Drs. Moekijat mengutip pendapat Henry L. Tosi mengemukakan sebagai berikut : Koordinasi adalah suatu proses mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya Drs. Moekijat mengutip pendapat Elmer H. Burack sebagai berikut “Koordinasi adalah pencapaian keselarasan usaha individu (dengan pekerjaan, kebutuhan pelanggan, dan seterusnya) ke arah pencapaian maksud dan tujuan organisasi, bagian atau kelompok”. Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa koordinasi berhubungan dengan usaha-usaha untuk menyatukan dan mengarahkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan fungsinya, agar setiap gerak langkah dalam usaha itu dapat merupakan suatu kebetulan aktivitas yang terarah kepada suatu sasaran yang telah ditentukan.

Dalam koordinasi diperlukan adanya keserasian pandangan agar segala aktivitas dalam melaksanakan

suatu rencana dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karena itu diperlukan sekali adanya pengetahuan serta pengertian tentang tujuan organisasi oleh semua pihak, dengan demikian pikiran serta kehendak dari masing-masing pihak dapat dikendalikan kepada sasaran yang akan dituju oleh organisasi itu.

Dalam organisasi terdapat kegiatan kelompok-kelompok atau unit kerja organisasi bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Unit kerja yang bekerja sama dalam organisasi tersebut mencerminkan suatu proses koordinasi, ini sejalan dengan pemikiran Herbert A. Simon yang dikutip oleh Sugandha (2003 : 9) mengemukakan sebagai berikut : “Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerjasama mencapai tujuan bersama”. Ini berarti koordinasi sangat penting, dalam penentuan daripada tujuan manajemen yang harus dicapai.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan koordinasi, senantiasa akan terdapat hubungan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yang mana pelaksanaannya harus

dikoordinasikan oleh seorang koordinator. Dalam melaksanakan koordinasi, koordinator harus cukup cakap dan di antaranya harus menguasai prinsip-prinsip koordinasi dengan baik. Agar setiap pekerjaan itu dapat terkoordinir sehingga sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai oleh karena itu diperlukan adanya keserasian pandangan. Demikian halnya keberadaan pengusaha kecil dan menengah agar dapat terbina dengan baik maka harus ikut bergabung dengan Dinas Koperasi dan UKM atau Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya. Seringkali menjadi kendala akibat kurangnya kesadaran para pengusaha kecil yang enggan untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan dinas terkait.

Membentuk sikap kewirausahaan dalam diri seseorang memerlukan suatu proses yang cukup panjang. Untuk membentuk dan menanamkan jiwa kewirausahaan, tidak cukup hanya mengharapkan bahwa individu tersebut mau belajar atau menggali sendiri konsep-konsep atau berbagai pengetahuan mengenai kewirausahaan. Kenyataannya tidak

sedikit pengusaha yang masih memerlukan berbagai fasilitas, bantuan dan arahan serta pembinaan baik oleh instansi terkait maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Pembinaan perilaku kewirausahaan mencakup sejauh individu mampu berfikir kreatif, menciptakan sesuatu yang inovatif dan berani menanggung resiko.

Kota Tasikmalaya memiliki potensi *home industry* yang menghasilkan beraneka ragam produk kerajinan yang memiliki daya tarik dan seni yang sangat luar biasa dan sebagian besar telah memenuhi gugus kendali mutu. Istilah Kota Tasikmalaya sebagai Pusat *Factory Outlet* kerajinan di Priangan Timur telah mengangkat nama Kota Tasikmalaya ini dikenal di dalam maupun luar negeri. Mayoritas masyarakat di Kota Tasikmalaya telah memanfaatkan "*home industry*" tersebut sehingga dengan bekal pengalaman, mereka telah memiliki keterampilan dan keahlian yang lebih dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Adapun potensi yang merupakan ciri khas dari Kota

Tasikmalaya adalah produk usaha kerajinan tangan (*handcraft*) diantaranya : bordir, kelom geulis, mendong, batik tulis, payung, topi pandan, tas, tikar dan kerajinan lainnya yang terbuat dari bambu, kayu, logam, kulit, bata merah, boneka dan aneka makanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pengambilan sampel sebanyak 30 responden diperoleh $r_s = 0,545$ berada dalam katagori hubungan sedang atau t hitung sebesar $= 4,1024$ dengan derajat kesalahan 5%, $dk = 30 - 28$ diperoleh t tabel sebesar 1,701. Ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi dengan pengembangan industri kecil di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan perhitungan statistik nilai koefisien determinasi sebesar 0,297. Artinya pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil bidang usaha bordir dan kerajinan tangan di Kota Tasikmalaya sebesar 29.7 %, sedangkan 70,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan statistik diperoleh hasil hubungan koordinasi dengan pengembangan industri kecil bidang usaha bordir dan kerajinan tangan di Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,545, dalam kategori sedang. Berdasarkan perhitungan statistik nilai koefisien determinasi sebesar 0,297. Artinya pengaruh koordinasi terhadap pengembangan industri kecil bidang usaha bordir dan kerajinan tangan di Kota Tasikmalaya sebesar 29.7 %, sedangkan 70,3 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Berdasarkan wawancara maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi sumbangan pendapatan usaha kerajinan bordir terhadap pendapatan total keluarga sangat berarti sedangkan ditinjau dari segi efisiensi ekonomis usaha tersebut efisien maka untuk meningkatkan sumbangan usaha kerajinan bordir terhadap pendapatan total keluarga, pengrajin hendaknya lebih meningkatkan produksinya baik kuantitas maupun kualitasnya.

Oleh karena itu guna peningkatan kualitas dari pengrajin bordir itu sendiri perlu adanya suatu program pengembangan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Kegiatan dimulai dengan melakukan survei untuk mengidentifikasi UKM potensial dengan melihat kekuatan, kelemahan serta mengidentifikasi berbagai macam hambatan serta peluang yang mungkin diperoleh.

2. Pemecahan masalah dilakukan melalui diskusi intensif dengan pelaku usaha, mulai dari penyedia bahan baku, jasa keuangan, pemerintah, perguruan tinggi, penyedia informasi hingga eksportir.
3. Dengan pendekatan itu, tim berharap dapat menghasilkan model pengembangan UKM yang realistis dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. Sehingga para pelaku usaha kecil ini tidak tertindas oleh pelaku usaha menengah ke atas yang dominan mempergunakan alat-alat serba canggih. Dan diharapkan UKM dapat berperan dan menjadi tulang punggung

perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan output yang baik demi tercapainya visi Kota Tasikmalaya yaitu Menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Perdagangan dan Industri termaju di Priangan Timur tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

A.G Kartasapoetra, 1987 *Pengantar Ekonomi Produksi*, PT Bina Aksara.

Hadi Prayitno dan Budi Santoso, 1996, *Ekonomi Pembangunan (Kriteria Sayogya)*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Lincoln Arssiyard, 1992, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE Yogya.

Ricard A Bilas, 1982 *Teori Ekonomi Makro*, Erlangga Jakarta.

Sayogya, 1985, *Peruang Berusaha, Peluang Bekerja dan Pembangunan Sosial Pedesaan dalam Mubyarto (Penyunting)*, 1985, Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan BPSES, Jakarta.

Sjahrir, 1991, *Analisis Ekonomi Indonesia*, Gramedia Jakarta.

Sudarsono, 1983, *Pengantar Ekonomi Makro*, LP3ES, Jakarta